



WUJUDKAN SATU DATA DAERAH TERINTEGRASI

Validitas Data Tentukan Kebijakan Tepat Sasaran

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya menaruh perhatian serius perihal program satu data daerah yang terintegrasi dan dapat diakses secara terbuka. Validitas data menjadi salah satu penentu dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogya Trihastono, mengungkapkan tata kelola data saat ini menjadi salah satu pilar utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Ia menekankan pentingnya mengubah paradigma lama yang melihat data sekadar sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Data tidak boleh berhenti sebagai angka. Ia harus menjadi alat ukur, pijakan arah kebijakan, dan cermin kondisi riil di lapangan. Karena itu, statistik sektoral menjadi sangat penting untuk memastikan pembangunan kita terukur dan tepat sasaran," tandasnya, Selasa (8/7).

Trihastono menyebut, tingkat kematangan statistik Kota Yogya terus menunjukkan perbaikan. Namun ia mengingatkan, tan-

tangan ke depan adalah meningkatkan konsistensi dan akurasi data di seluruh perangkat daerah, serta memastikan integrasi antar sistem yang ada. "Kita bersyukur bahwa capaian indeks statistik sektoral Yogyakarta sudah naik signifikan. Tapi ini belum cukup. Masih ada ruang pembenahan, termasuk soal verifikasi, validasi, dan siapa yang bertanggung jawab atas data di lapangan," lanjutnya.

Dirinya juga menyinggung pentingnya sinergi antara pihaknya sebagai walidata, organisasi perangkat daerah sebagai produsen data, dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data. Hal ini karena kerja-kerja statistik bukan hanya teknis tetapi juga strategis dan harus mendapat perhatian lintas jenjang, dari lurah hingga kepala perangkat daerah.

"Pak Walikota selalu mengingatkan bahwa kebijakan harus berbasis data. Maka para pengelola data di OPD, kelurahan, hingga kecamatan harus punya kepedulian dan pemahaman yang sama terhadap pentingnya statistik sektoral ini," jelasnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya Susanto Dwi Antoro, menekankan pentingnya penyusunan kebijakan publik yang berbasis pada data yang akurat, mutakhir, dan relevan.

Menurutnya, data memiliki peran strategis sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Data yang berkualitas tidak hanya membantu mengidentifikasi permasalahan secara tepat, tetapi juga merancang solusi yang efektif dan tepat sasaran.

"Masih banyak kebijakan yang disusun tanpa didukung data yang lengkap, terbaru, atau bahkan tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Akibatnya, kebijakan menjadi tidak efisien dan bisa menimbulkan ketidakadilan sosial," tegasnya.

Ia mencontohkan permasalahan dalam distribusi bantuan sosial, di mana seringkali terjadi ketidaktepatan sasaran akibat data penerima manfaat yang tidak diperbarui. "Ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdaftar, sementara yang sudah tidak berhak justru masih memperoleh," ungkap Susanto.

Menurutnya, situasi ini menunjukkan bahwa kualitas data sangat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Terlebih lagi, di era keterbukaan informasi dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan responsif. Data tidak boleh lagi sekadar menjadi pelengkap administratif, tetapi harus menjadi alat strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

"Teknologi bukan jaminan jika tidak dibarengi dengan kompetensi dan tata kelola yang baik. Kita harus membangun sistem data yang bukan hanya kuat secara teknis, tapi juga akurat secara substansi," katanya.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005